

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan jurnalistik sendiri muncul berabad-abad tahun yang lalu berkembang sangat pesat diiringi dengan perkembangan teknologi komunikasi saat ini. Jurnalistik sendiri hadir karena adanya sebuah kebutuhan akan informasi untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi disekitar, menimbulkan sebuah kegiatan untuk menghimpun informasi dan membentuk sebuah berita, yang dilanjutkan mencari kebenaran atau fakta akan informasi tersebut, dan melaporkannya. Melalui sebuah media massa kegiatan jurnalistik dapat terus ada dan berlangsung hingga saat ini, yang diawali dengan ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1450-an.

Wartawan atau seorang jurnalis adalah ujung tombak dari media massa karena memiliki peranan penting dalam mencari sebuah berita sebagai bahan yang nantinya akan diolah dalam dapur redaksi. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) wartawan adalah seseorang yang memiliki pekerjaan untuk mencari berita untuk dimuat di surat kabar, majalah, radio, televisi, atau saat ini media online. Seorang wartawan tidak hanya sebatas profesi yang mengandalkan keahlian menulis ataupun merangkai sebuah informasi hingga menjadi sebuah berita, tapi memiliki tanggungjawab yang memerlukan kesadaran tinggi dari pribadi seorang wartawan (Kusumaningrat, 2012:1).

Perkembangan tentang profesi jurnalis atau wartawan dipengaruhi oleh sistem pers yang dianut dalam suatu negara. Sistem pers sendiri pada suatu negara dipengaruhi oleh sistem politik yang berlaku pada sebuah negara tersebut. Contoh Indonesia yang menggunakan bentuk atau sistem pemerintahan demokratis, tentu berbeda sistem persnya dengan negara Myanmar yang menganut bentuk atau sistem pemerintahan militeristik (Kusumaningrat, 2012:18). Berikut adalah penjelasan dari bagan contoh dari sistem pers Indonesia oleh JB Wahyudi (dalam Nurudin, 2005:7).

Berawal dari filsafat absolutisme akan menghasilkan ideologi otoriter, yang akhirnya menciptakan sebuah bentuk pers yang otoriter pula. Bentuk pers yang otoriter akan mengutamakan penguasa dalam hal ini ialah pemerintah ataupun pemimpin suatu negara. Kemudian dari filsafat individualism dimana nantinya akan memunculkan ideologi liberal, dan menciptakan bentuk pers yang liberal dan juga bebas tapi ada tanggungjawab sosial. Pers liberal akan lebih mengutamakan kepentingan individu dalam hal ini ialah si pemeluk dari media massa. Filsafat materialisme sendiri memunculkan ideologi komunis, dan menciptakan bentuk pers partai dan mengutamakan kepentingan partai. Indonesia sendiri menganut falsafat ataupun ideologi Pancasila yang merupakan hasil dari pengolahan filsafat absolutisme, individualism dan materialisme. Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai bentuk pers di Indonesia, dimana bentuk pers Pancasila mengutamakan keseimbangan kepentingan nasional menghasilkan pers yang bebas tapi tetap memiliki tanggung jawab sosial kepada diri sendiri, individu lain, masyarakat, pemerintahan, alam lingkungan, tuhan.

Sebelum dengan sistem pers yang saat ini Indonesia pernah mengalami beberapa kali sistem pers yang dianut, dari sistem pers bertanggungjawab sosial yang dalam praktiknya menjadi sistem pers otoriter pada orde lama saat Soekarno menjadi presiden. Setelah itu dilanjutkan dengan terjadinya peristiwa gerakan 30 september 1965 yang biasa kita kenal dengan G30S/PKI. Masa orde baru dimulai saat Soeharto berhasil menjadi presiden RI yang ke 2 setelah Soekarno dan dikukuhkan pada 1967, pers otoriter yang benar benar otoriter diberlakukan saat itu (Kusumaningrat, 2012:36). Oleh sebab itu keberadaan jurnalis tidak berkembang seperti saat ini, karena setiap perkataan atau informasi yang dimuat untuk sebuah berita harus mengutamakan penguasa yaitu pemerintah itu sendiri.

Kemerdekaan pers di Indonesia sendiri dimulai pada masa reformasi yang diiringi dengan dicabutnya undang-undang yang membatasi jurnalis untuk bersuara serta dicabutnya surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) (Nurudin, 2005:79). Sebagai penggantinya undang undang pers No. 40 Tahun 1999 saat masa B.J Habibie pada 21 Mei 1998 menggantikan Soeharto sebagai presiden yang telah dipaksa turun dari kursinya.

Sejak saat itu hingga sekarang pers Indonesia berkembang dengan pesat ditandai dengan banyaknya media massa yang bermunculan, dari cetak, radio, televisi, hingga online. Hal ini menunjukkan bahwa dengan media massa yang jumlahnya terus bertambah dari tingkat daerah hingga nasional menunjukkan kebutuhan akan seorang jurnalis pun meningkat. Maka muncul lembaga atau organisasi yang menaungi para jurnalis seperti persatuan wartawan Indonesia (PWI), aliansi jurnalis independen (AJI), dan sebagainya.

Sidoarjo sendiri merupakan Kabupaten yang berbatasan langsung dengan ibu kota provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya, sehingga membuat Sidoarjo sedikit banyak telah dilihat oleh perusahaan media massa untuk mendirikan anak cabangnya. Seperti Jawa Pos Grup, TV lokal swasta seperti Arek Tv, radio siaran pemerintah Kabupaten (RSPK), dan sebagainya. Oleh sebab itu banyak di Sidoarjo terdapat asosiasi atau perkumpulan wartawan, diantaranya forum wartawan Sidoarjo (Forwas), aliansi jurnalis Sidoarjo (AJS), komite wartawan reformasi Indonesia (KWRI).

Saat menjalankan tugasnya seorang wartawan dituntut mengikuti rambu-rambu yang telah diatur, di samping Kode Etik Jurnalistik yang harus dipegang teguh. Masih terdapat ketentuan lainnya yang harus dijalankan, seperti Undang-Undang RI No 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan sepuluh penulisan tentang hukum, yang merupakan hasil dari karya latihan wartawan (KLW) yang diadakan oleh persatuan wartawan Indonesia (PWI) bersama lembaga bantuan hukum (LBH) Jakarta pada tahun 1977 di Cibulan, Bogor. Terdapat beberapa hal yang menjadi kendala untuk menjalankan aturan-aturan tersebut, dan bertentangan dengan tanggungjawab sebagai seorang wartawan. Sebagai contoh masih terdengar beberapa istilah yang menyindir tentang seputar dunia pers di Indonesia seperti wartawan amplop dan wartawan bodrex yang keberadaannya masih ada hingga saat ini, tertutup rapat dengan beberapa orang yang mengetahui. Hal ini menunjukkan bahwa aturan yang telah dibuat hanya sebatas pembatas, yang kapan saja dapat dilewati ketika keadaan menunjukkan kesempatan untuk melakukannya.

Berbagai jurnal dan penelitian menunjukkan betapa rapuhnya independensi seorang wartawan karena berbagai faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya rendahnya kompensasi yang diberikan sebuah media massa menyebabkan jurnalis melakukan cara lain diluar ketentuan yang telah ditetapkan demi memenuhi kebutuhan hidup sehingga menyebabkan seorang jurnalis mudah menerima amplop dari narasumber atau orang yang memiliki kepentingan terhadap berita yang akan ditulis (Lubis, 2011)

Wartawan amplop adalah seorang wartawan asli yang dalam menjalankan tugasnya senang mendapatkan amplop atau memang dengan sengaja mencari amplop yang biasanya berisikan uang dari narasumber dengan maksud dan tujuan tertentu yang didalamnya terdapat kepentingan dari narasumber atau dengan kata lain bisa diartikan sebagai bentuk suap. Tujuan tersebut tidak jauh berhubungan dengan tugas dari seorang wartawan, biasanya sebagai ungkapan terimakasih karena dirinya telah dijadikan sebagai narasumber dan beritanya akan/telah ditayangkan di media massa tempat wartawan bekerja. Bisa juga dengan tujuan agar berita yang akan dipublikasikan akan menunjukkan sisi positif, atau bahkan agar berita yang benar-benar merugikan narasumber bersangkutan agar tidak dipublikasikan.

Berbeda dengan wartawan bodrek atau orang juga menyebutnya dengan wartawan tanpa surat kabar (WTS) yang dengan sengaja mencari narasumber/korban yang memiliki masalah yang menyangkut tentang nama baiknya, atau bahkan tentang tindak pidana yang dituduhkan padanya/narasumber. Biasanya wartawan bodrek akan menakuti dengan ancaman akan mempublikasikan permasalahan yang dituduhkan kepada korbannya, dengan harapan akan mendapatkan uang, sebagai pengganti agar berita tersebut tidak dipublikasikan. Berikut adalah bukti dari adanya praktik wartawan amplop yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.



Gambar 1 Harian sinar harapan, edisi Jum'at (05/07/2013)



Gambar 2 Jawa pos, edisi Jum'at (13/02/2015)

Menurut Kusumaningrat (2012), menjelaskan bahwa dalam pers Barat mengenal istilah *freebies* yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ialah “gratisan”. Sehingga tidak hanya dalam bentuk amplop yang akan diterima oleh wartawan, kata “amplop” hanya sebagai istilah bentuk imbalan yang diartikan

uang tapi bisa saja amplop atau *freebies* ini berisikan berbagai hal yang menguntungkan bagi wartawan seperti voucher belanja, pulsa, dan sebagainya. Hal ini sangat bertentangan dengan kode etik jurnalistik, pasal 4 tahun 2003 yang berbunyi “wartawan Indonesia tidak menerima imbalan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan berita, tulisan atau gambar, yang dapat menguntungkan atau merugikan seseorang atau sesuatu pihak.”.

Fokus penelitian kali ini ditujukan kepada wartawan asli yang tetap menerima amplop, atau dapat dikatakan sebagai wartawan amplop. Karena mereka memang benar-benar terjun ke dalam dunia jurnalis, berbeda dengan wartawan bodrek atau WTS yang memang tujuan mereka adalah mencari uang melalui amplop yang diberikan oleh narasumber/korban mereka. Menurut Kusumaningrat (2012) dalam bukunya, menjelaskan bahwa beberapa wartawan dapat menerima *freebies* ini, tapi dengan syarat tidak akan mengganggu kenetralan dari wartawan dalam membuat sebuah berita. Maka dari itu penelitian ini akan melihat praktik wartawan amplop yang dilakukan oleh wartawan yang memiliki wilayah liputan di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga mengetahui proses ataupun interaksi antara wartawan dan narasumber yang memberikan amplop ataupun dalam bentuk lainnya yang dapat dikategorikan sebagai *freebies*. Karena disini independensi atau kenetralan wartawan dipertaruhkan, meskipun yang nantinya akan tetap melalui redaktur, pimpinan redaksi, dan sebagainya sampai berita tersebut ditayangkan.

Pada penelitian sebelumnya terlihat dari keikutsertaan wartawan terhadap organisasi pers dan peranan kompensasi yang diterima oleh wartawan akan mempengaruhi seorang wartawan untuk menerima atau menolak amplop atau dalam bentuk lainnya pemberian dari narasumber, sehingga akan menghasilkan sebuah temuan adanya praktik wartawan amplop. Hal tersebut yang menyebabkan penelitian ini lebih menitik beratkan terhadap interaksi atau komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh wartawan amplop dengan narasumbernya, dimana keduanya memiliki kepentingan tersendiri dengan berita yang akan diliput oleh wartawan tersebut. Sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini akan mengetahui bentuk-bentuk praktik yang dilakukan oleh wartawan amplop di

Kabupaten Sidoarjo. Menggunakan studi fenomenologi akan mendapatkan sebuah temuan dari pengalaman sadar sudut pandang orang pertama yaitu jurnalis yang menjadi wartawan amplop. Melalui pengalaman sadar dalam hal ini menurut Husserl (dalam Kuswarno, 2013:22) yaitu kesengajaan yang meliputi di dalamnya persepsi, gagasan, memori, imajinasi, emosi, hasrat, kemauan, sampai sebuah tindakan. Sehingga akan ditemukan konsep diri dari seorang wartawan amplop yang nantinya dapat mengetahui tipe-tipe wartawan amplop berdasarkan konsep diri tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengambil rumusan masalah bagaimana pengalaman komunikasi wartawan amplop dalam forum wartawan Sidoarjo (Forwas)?

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan menggambarkan pengalaman komunikasi seorang wartawan amplop ketika berhubungan atau berinteraksi dengan narasumber, sesama rekan wartawan dan media massa tempat dia bekerja, serta beberapa hal yang berkaitan di dalamnya seperti motif dan konsep diri wartawan amplop itu sendiri. Wartawan yang akan dijadikan sebagai informan ialah wartawan aktif yang terdaftar sebagai anggota organisasi forum wartawan Sidoarjo yang melakukan praktik wartawan amplop, dengan informan ialah ketua organisasi tersebut.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini untuk mengetahui berbagai pengalaman komunikasi yang dilakukan oleh wartawan amplop dengan narasumber atau dengan teman sejawat dalam praktik wartawan amplop forum wartawan Sidoarjo (Forwas). Sehingga dapat menjadi bahan acuan bagi wartawan dalam menjalankan profesinya sebagai penyampai kebenaran

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1.5.1 Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu komunikasi khususnya terhadap studi fenomenologi
- b. Meningkatkan pengetahuan peneliti tentang fenomena wartawan amplop yang diteliti dalam perspektif komunikasi.

1.5.2 Praktis

- a. Memberikan pengetahuan tentang fenomena wartawan amplop yang ada di Kabupaten Sidoarjo.
- b. Memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait.
- c. Memberikan referensi tentang dunia kewartawanan.